

BAB V

KESIMPULAN

Tibet dahulunya adalah sebuah kerajaan merdeka yang mengalami interaksi maupun benturan terutama secara politik dengan dinasti-dinasti yang ada di dataran Cina. Raja Tibet diberi gelar Dalai Lama dimana Dalai Lama yang sekarang, Tenzin Gyatso adalah Dalai Lama ke-14. Dalai Lama adalah pemimpin negara Tibet dan sekaligus pemimpin keagamaan.

Tibet menjadi provinsi Cina setelah serbuan tentara merah Cina pada tahun 1950 ke wilayah ini, pada musim gugur 1951 pasukan Cina berhasil menguasai ibu kota Lhasa dan mendongkel Dalai Lama dari kekuasaannya. Dalihnya, Dalai Lama menolak kesepakatan kerjasama bertajuk "Rencana Pembebasan Damai Tibet" yang teorinya nampaknya menguntungkan Tibet, namun prakteknya Cina melakukan penindasan dan pembantaian terhadap kepala suku dan sejumlah pendeta (Lama) yang dianggap membangkang, alasan lain Cina adalah "menghapus praktek penindasan bergaya feodalisme" di Tibet. Namun menurut beberapa analis internasional, Cina mengincar kandungan mineral yang terkandung didalam bumi Tibet. Pada tanggal 17 Maret 1959, Dalai Lama berhasil meloloskan diri dari pengakapan tentara Cina ke dan mendirikan semacam pemerintahan pelarian di Dharamsala, India utara.

Beberapa bulan berselang, Tibet mencuat sebagai sorotan masyarakat internasional. Tibet yang dikenal mempunyai sejarah keunikan peradaban yang arif kembali menorehkan polemik yang cukup dramatis. Aksi para biksu Tibet dalam

menggalang tuntutan terhadap China seakan mengulang kembali pemberontakan Tibet yang pernah bergolak di Tahun 1959.

Pergolakan di Tibet bukan semata-mata terjadi secara reaksioner, tetapi sengaja telah direncanakan melalui upaya sistematis untuk meluncurkan kembali gerakan protes rakyat Tibet sekaligus dibarengi dengan *bollow-up* media secara besar-besaran. Beranjak dari situlah Amerika Serikat memposisikan dirinya untuk terlibat sebagai "pahlawan". Melalui media, China ditempatkan sebagai tertuduh oleh banyak pihak, sementara pihak demonstran Tibet yang sempat melakukan tindakan anarkis tetap memperoleh simpati. Artinya, tindakan anarkis oleh rakyat Tibet tidak diangkat oleh media, agar memunculkan opini bahwa memang pada dasarnya pemerintah Chinalah yang represif. Tujuan yang muncul adalah keyakinan dogmatis bahwa Tibet benar-benar ditindas oleh Cina.

Cina yang pada tahun 1959 memberikan sebuah otonomi khusus, namun hal tersebut hanya sebuah retorika. Terjadinya pelanggaran HAM seperti tindakan represif, penolakan kebebasan beragama, perusakan tempat ibadah, dan politisasi agama terus terjadi di Tibet hingga sekarang. Hal ini kurang tersorot media karena ditutup-tutupi oleh pembangunan dan proyek modernisasi Tibet. Kebebasan tidak lagi dirasakan. Hal ini mendorong terjadinya gerakan perlawanan di dataran Tibet. Meskipun begitu, Dalai Lama menolak perlawanan fisik dan terus menyerukan aksi dan diplomasi secara damai. Karena konsistensinya penolakannya terhadap perang dan

terus menyerukan penghapusan pelanggaran HAM dengan perdamaian, Dalai Lama memperoleh Nobel Perdamaian pada tahun 1989. Bahkan ia dianggap disejajarkan dengan tokoh-tokoh protagonis perdamaian terbesar seperti Mahatma Gandhi.

Pemberontakan Tibet 1959 dimulai pada tanggal 10 Maret 1959 ketika revolusi anti-Cina dan anti-Komunis meletus di Lhasa, ibukota Tibet, yang berada dalam kekuasaan Partai Komunis Cina sejak Tentara Pembebasan Rakyat menginvasi Tibet tahun 1950. Akar permasalahan konflik ini adalah menyangkut perlakuan penguasa Cina terhadap masyarakat Tibet yang tidak mendapatkan perlakuan baik dibandingkan etnis lain dari suku Han. Hal inilah yang memicu terjadinya gerakan perlawanan dan pemberontakan pertama di Tibet.

Protes di Lhasa, Tibet dimulai seawal 1987 tetapi pemberontakan pada tanggal 5 Maret 1989 ketika sekelompok kecil Tibet rahib, biarawati dan warga sipil di kawasan pusat Barkhor Lhasa. Unjuk rasa pada masa ini lebih disebabkan tindakan represif tentara dan polisi Cina terhadap para pengunjung rasa yang mengabaikan hak-hak sipil warga dalam kegiatan-kegiatan sosial maupun politik. Rakyat Tibet untuk memprotes Pemerintah Cina terhadap perlakuan pada warga Tibet dan menuntut kebebasan politik yang lebih besar. Hal ini juga yang membuat rakyat Cina mendesak Pemerintahnya untuk bersikap menghormati hak-hak warga Tibet.